



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH



TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh berperan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46) bidang pendidikan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh didukung dengansumberdaya yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

**Tabel 1.1
Potensi Aparatur**

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH	LK	PR
1	Kepala Dinas	II b	1	1	-
2	Sekretaris	III a	1	1	-
3	Kepala Bidang	III b	3	2	1
4	Kasubag	IV a	1	-	1
5	Kasi	IV a	6	-	6
6	Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi	-	3	-	3
6	Staf	-	31	15	16
7	Pengawas Sekolah	-	11	6	5
8	Kepala SKB	-	1	1	-
9	Staf SKB		2	-	2
10	Pamong Belajar		2	-	2
	JUMLAH		62	26	36

*Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Data
Dinas Pendidikan (2024)*

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan kelembagaan seperti :

**Tabel 1.2
Potensi Sarana dan Prasarana**

NO	LEMBAGA	JUMLAH
1	Dinas	1
2	SKB	1
3	Lembaga PAUD	139
4	SD Negeri dan Swasta	85
5	SMPNegeri / Swasta	19
6	Dikmas	6
	JUMLAH	251
	ASET DINAS PENDIDIKAN	
1	Laptop	91
2	PC	60
3	Printer	71

Sumber : Bagian Data dan Aset Dinas Pendidikan (2024)

Dari data menunjukkan potensi sarana dan prasarana pendidikan Kota Payakumbuh cukup memenuhi kemampuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46) bidang pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi serta Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 1 (Satu Sub Bagian dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dengan uraian tugas masing-masing :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Program dan Keuangan.

3. Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Dasar dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- 1) Seksi Kurikulum Peserta Didik SD
- 2) Seksi Kurikulum Peserta Didik
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan Data Kependidikan

5. Bidang PAUD dan PNFI

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang PAUD dan PNFI mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang PAUD dan PNFI.

Bidang PAUD dan PNFI menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang PAUD dan PNFI;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

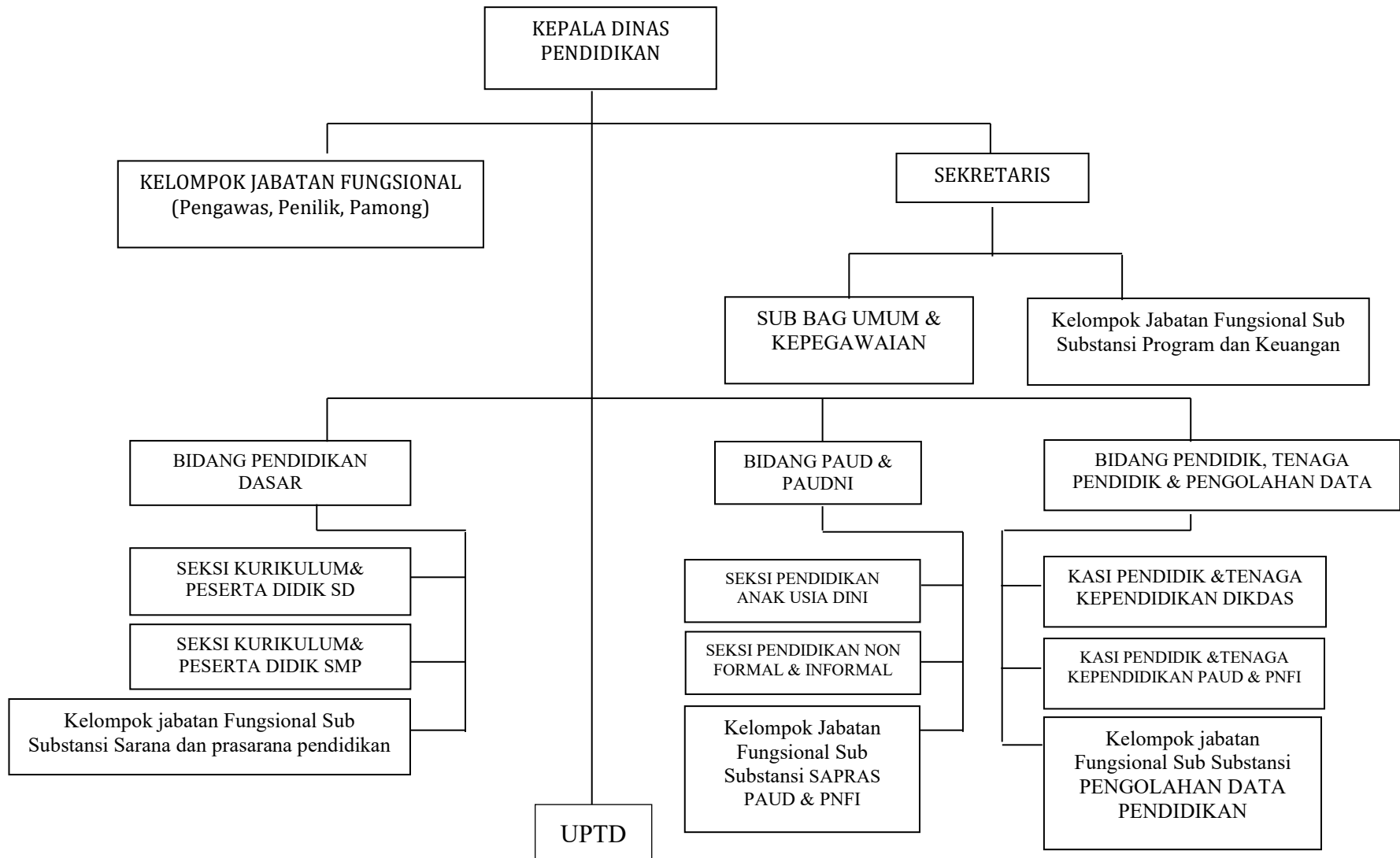
Bidang PAUD dan PNFI dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- e. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Seksi Pendidikan Formal dan Informal
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana PAUD dan PAUDNI

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

Perwako Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021



D. Isu Strategis

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.

Program pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara formal. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang.

Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pendidikan jangka menengah Kota Payakumbuh untuk periode 4 (empat) tahun mendatang.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pendidikan Kota Payakumbuh untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional, dan nasional maupun global.

Permasalahan pokok pendidikan Kota Payakumbuh pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa hal yaitu sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, orang tua serta stake holder pemerhati pendidikan. Sedangkan kendala dan tantangan masalah sarana prasarana dan sumber daya manusia adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pendidikan Kota Payakumbuh pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa hal yaitu sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, orang tua serta stake holder pemerhati pendidikan. Sedangkan kendala dan tantangan masalah sarana prasarana dan sumber daya manusia adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan permasalahan sekarang ini antara lain adalah :

1. Masih rendahnya kualitas kompetensi guru/pendidik di semua jenjang pendidikan
2. Belum meratanya distribusi guru/ pendidik yang kompeten antar satuan Pendidikan
3. Adanya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah yang berdampak pada efektifitas pembelajaran dan pemenuhan standar rombongan belajar (rombel)

4. Belum optimalnya capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi pada satuan Pendidikan
5. Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan keterampilan
6. Belum optimalnya upaya penanganan dan reintegrasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Payakumbuh
7. Masih ada sekolah negeri dengan jumlah siswa di bawah standar rombongan belajar
8. Rendahnya penerapan transformasi digital dan pendekatan bilingual di satuan Pendidikan
9. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan local (Mulok) yang kontekstual dan berbasis potensi daerah
10. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan satuan Pendidikan
11. Belum optimalnya pendidikan berbasis komunitas sebagai bagian dari ekosistem Pendidikan
12. Belum optimalnya tata kelola dan sinergi pendidikan vokasi dengan dunia usah/kerja
13. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan vokasi
14. Belum optimalnya pembiayaan pendidikan lanjutan (Perguruan Tinggi)
15. Belum optimalnya implementasi Pendidikan karakter di Satuan Pendidikan

Pendidikan Kota Payakumbuh pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan Pendidikan di Kota Payakumbuh, maka hal yang perlu ditingkatkan adalah :

1. Pembangunan pendidikan di Kota Payakumbuh dilakukan melalui pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan tata kelola pendidikan. Ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar pelayanan dibidang pendidikan.
2. Pemantapan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan mengembangkan Wajib Belajar 12 Tahun.
3. Peningkatan mutu pendidikan disemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas melalui keseimbangan antara pemenuhan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
5. Pengembangan satuan pendidikan berstandar nasional, internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang mempedomani tata kelola pendidikan, mengharapkan partisipasi masyarakat dan stake holder dalam upaya membantu manajemen pendidikan dalam proses perencanaan dan pengontrolan implementasi program pendidikan.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82). Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21). Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817).
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/ 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1)
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46);

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta berpedoman kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pada periode Renstra 2025-2029 terjadi kekosongan kepala daerah, oleh sebab itu penyusunan Renstra 2025-2029 dititikberatkan pada penyelesaian isu-isu strategis, permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga berpedoman pada renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi serta Renstra Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dengan adanya Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang sudah disesuaikan dengan berbagai

regulasi, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan perencanaan selama empat tahun tahun kedepan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, sebab dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pengelola dan aparat pelaksana kebijakan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam pencapaian tujuan, sasaran, peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja serta bagaimana beberapa program dan kegiatan prioritas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yang dilengkapi dengan pencapaian indikator dari tahun 2025-2029.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh selama kurun waktu empat tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah (empat tahun), menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran Dinas Pendidikan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun yang disebut dengan pembangunan jangka pendek, kemudian dituangkan ke dalam daftar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan.

B. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada

dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh pada Tujuan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1. Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing**
- 2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel**
- 3. Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK**

Dalam pengembangan depan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada hakekatnya merupakan aktualisasi dari pengembangan arah jangka menengah 5 (lima) tahun 2025-2029, dan mengacu pada tujuan diatas, maka tujuan Dinas Pendidikan adalah :

“Terwujudnya Pendidikan Kota Payakumbuh Yang Berkualitas” dengan Indikator sebagai berikut :

- Harapan Lama Sekolah

Untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan **Sasaran Dinas Pendidikan** berdasarkan tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan

Indikator :

- a. Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi
- c. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi

2. Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik

- a. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- a. Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, untuk menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Pendidikan Kota Payakumbuh Yang Berkualitas		Harapan Lama Sekolah	14,62	14,75	14,91	15,02	15,16	15,29
		Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,16	11,30	11,38	11,48	11,62	11,79
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	87,5	87,9	88,2	88,8	89,25	89,5
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	84,4	85,65	86,5	87,75	89,0	90,25
		Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	58,35	58,70	58,90	59,10	59,30	60,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	74,00

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumusan	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = (\sum xi) / n$ Dimana: • RLS: adalah Rata-rata Lama Sekolah • $\sum xi$: adalah jumlah total tahun pendidikan yang ditempuh oleh semua individu dalam kelompok usia tertentu • n: adalah jumlah total individu dalam kelompok usia tersebut	BPS
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	Nilai AN Literasi Membaca dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan (Kemendikbud)
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Nilai AN Numerasi dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan (Kemendikbud)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumusan					Sumber Data																																
2.	Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Nilai Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari Rapor Pendidikan					Rapor Pendidikan (Kemendikbud)																																
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	<table><tr><td rowspan="2">Komponen</td><td>Sub Komponen 1 Keberadaan</td><td>Sub Komponen 2 Kualitas</td><td>Sub Komponen 3 Pemanfaatan</td><td rowspan="2">Total Bobot</td></tr><tr><td>20%</td><td>30%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot	20%	30%	50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat			
Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan		Total Bobot																																			
	20%	30%	50%																																					
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																				
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																				
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																				
Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																				

C. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,16
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	87,50
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	84,4
2.	Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	58,35
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	71,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pendidikan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat tinggi	$91\% \leq 100\%$	
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$	
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$	
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$	
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kondisi Akhir Renstra	Capaian %
1.	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,16	11,08	99,28	15,16	73,09
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	Persen	87,50	86,96	99,38	89,25	97,43
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Persen	84,4	82,7	97,99	89,00	92,92
2.	Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	58,35	56,65	97,09	59,30	95,53
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Persen	71,00	70,50*	99,00	73,00	96,58

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja tidak mencapai target 100% ditunjukan indikator Rata-Rata Lama Sekolah, Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi, Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,16	11,08	99,28
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	Persen	87,50	86,96	99,38
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Persen	84,4	82,7	97,99
2.	Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	58,35	56,65	97,09
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Persen	71,00	70,50*	99,00

Sumber Data : Buku Profil Dinas Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0%
2	Sesuai Target	0%
3	Tidak Mencapai Target	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pemerataan Kualitas Pendidikan

%	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,16	11,08	99,28
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	Persen	87,50	86,96	99,38
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Persen	84,4	82,7	97,99

Sumber Data : Buku Profil Dinas Pendidikan Tahun 2025

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemerataan Kualitas Pendidikan

Sasaran 1 (satu) ini merupakan pada RPJPD 2025-2045, dinyatakan bahwa Kota Payakumbuh yang akan dituju di masa depan adalah **“Payakumbuh Bermartabat, Maju dan berkelanjutan sebagai Perwujudan Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**. Visi ini kemudian diturunkan dan diperkuat di dalam RPJMD 2025-2029 dengan penambahan penekanan pada fokus di pemberdayaan dan pengembangan, kualitas pendidikan dan Sentra UMKM, atas dasar ketiga ide tersebut, maka visi RPJMD 2025-2029 dirangkum dalam susunan kata dan kalimat **“Tersedianya Payakumbuh Kota Maju yang Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif”**, yang menyandang arti bahwa (1) **“Maju”** sehingga Kota Payakumbuh dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri, dan lebih baik lagi, untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera. (2) **“Martabat”** sehingga dengan kemajuan yang diraih, Kota Payakumbuh dapat menjalankan kehidupan sosial budayanya dengan berkarakter yang mencerminkan harga diri, kesadaran, dan kebanggaan warga atas kotanya. (3) **“Pemberdayaan”** yang menjadi fokus dari pembangunan kota, bahwa tidak hanya menciptakan kota yang maju dan bermartabat tetapi pembangunan daerah tahun 2025-2029 bertujuan untuk membangun masyarakat Payakumbuh lebih berdaya dan lebih berkembang. (4) **“Pengembangan Kualitas Pendidikan”** Pendidikan yang berkualitas menjadi fokus pengembangan Kota, dengan menjadikan (5) **“Sentra UMKM”** sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Sasaran 1 (satu) ini didukung secara terpadu oleh Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(PTK) dan Bidang PAUD dan PAUDNI, yang dihimpun oleh Subbidang Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota payakumbuh.

Untuk mengukur sasaran 1 (satu) ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator, berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan :

1. Rata-rata Lama Sekolah

Capaian kinerja nyata indikator Rata-rata Lama Sekolah adalah sebesar 11,08 dengan target sebesar 11,16% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,28% kategori **Sangat Tinggi** tapi rendah dari yang diperjanjikan. Rendahnya realisasi dipengaruhi oleh kendala ekonomi, putus sekolah, dan disparitas antarwilayah (perkotaan vs perdesaan, serta antarprovinsi).

Rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Payakumbuh umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti kebutuhan bekerja dini untuk membantu keluarga dan terbatasnya biaya pendidikan, serta faktor sosial-budaya seperti pernikahan dini dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa RLS Kota Payakumbuh sebenarnya tergolong tinggi di Sumatra Barat, mencapai (10,89) tahun pada 2024, setara kelas XI. Berikut adalah rincian faktor-faktor yang sering menjadi tantangan:

- **Faktor Ekonomi** : Keterbatasan biaya pendidikan menyebabkan sebagian penduduk usia sekolah lebih memilih bekerja, terutama di sektor informal atau pertanian (misalnya pengolahan hasil pertanian/sanja) untuk membantu perekonomian keluarga.

- **Faktor Sosial-Budaya** : Masih adanya praktik pernikahan usia dini di sebagian masyarakat yang memaksa anak putus sekolah.
- **Akses dan Motivasi** : Kurangnya motivasi atau kesadaran sebagian orang tua akan pentingnya menempuh pendidikan setingkat perguruan tinggi, sehingga fokus pendidikan sering terhenti di tingkat menengah.
- **Tantangan Geografis/Infrastruktur** : Walaupun fasilitas pendidikan di pusat kota memadai, potensi ketimpangan akses di daerah pinggiran kota dapat memengaruhi keberlanjutan sekolah.

Meskipun RLS kota ini meningkat, tantangan utamanya adalah mendorong masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun dan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Adapun poin-poin penting mengenai rendahnya rata-rata lama sekolah di Indonesia:

- **Pencapaian Nasional** : Berdasarkan data BPS tahun 2025, RLS Indonesia baru mencapai 9,07 tahun, atau setara SMP kelas 3. Meskipun naik dari tahun sebelumnya, peningkatan ini melambat.
- **Disparitas Wilayah** : RLS di perdesaan terpaut dua tahun lebih rendah dibandingkan perkotaan. Provinsi dengan RLS terendah seringkali berada di wilayah Timur, seperti Papua Pegunungan yang tercatat hanya 5,1 tahun.
- **Penyebab Utama** : Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana banyak anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/ sederajat, atau putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah.

- **Dampak:** Rendahnya RLS berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan, serta menghambat kesiapan tenaga kerja.
- **Upaya Pemerintah:** Upaya untuk meningkatkannya melibatkan program wajib belajar 13 tahun (termasuk PAUD) dan perbaikan akses serta fasilitas pendidikan, terutama di daerah yang tertinggal.

Rendahnya RLS ini menjadi tantangan besar untuk mencapai visi pendidikan jangka panjang, karena menunjukkan belum meratanya akses dan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi.

2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi adalah sebesar 86,96% (Baik) dari target sebesar 87,50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,38% kategori **Sangat Tinggi** atau rendah dari target yang diperjanjikan.

Untuk tingkat propinsi, capaian ini sudah termasuk Peringkat atas (1-20%) di Sumatera Barat.

- Faktor Penyebab Utama

- a. **Rendahnya Minat Baca :** Kurangnya kebiasaan membaca sejak dini dan persepsi bahwa membaca adalah kegiatan membosankan dibandingkan mengakses media digital.

- b. **Sarana dan Prasarana Minim** : Fasilitas pendidikan, terutama perpustakaan dan ketersediaan buku yang berkualitas, masih kurang di banyak satuan pendidikan.
- c. **Kualitas Pembelajaran** : Guru menghadapi kendala dalam pengelolaan kelas, kurangnya pelatihan profesional terkait literasi, dan pendekatan pembelajaran yang cenderung monoton.
- d. **Kesenjangan Wilayah** : Permasalahan literasi masih menjadi tantangan besar, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal (3T)

- **Strategi dan Intervensi**

- **Peningkatan Kualitas Guru** : Mengikuti pelatihan profesional untuk meningkatkan keterampilan mengajarkan literasi.
- **Pembelajaran Inovatif** : Menerapkan model pembelajaran kreatif yang mendorong siswa aktif membaca dan menulis.
- **Penguatan Peran Orang Tua** : Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam menyediakan bahan bacaan dan kebiasaan membaca di rumah.
- **Intervensi Khusus** : Pelaksanaan Asesmen Nasional (ANBK) yang berkesinambungan (2021-2024) digunakan untuk memetakan dan memberikan intervensi spesifik ke sekolah yang membutuhkan.

Rendahnya literasi ini tidak hanya berdampak pada kemampuan membaca, tetapi juga berpengaruh pada rendahnya kemampuan berpikir kritis dan numerasi peserta didik.

3. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi adalah sebesar 82,70% dari target sebesar 84,40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,99% kategori **Sangat Tinggi** atau rendah dari target yang diperjanjikan. Untuk tingkat propinsi, capaian ini sudah termasuk Peringkat atas (1-20%) di Sumatera Barat.

Hasil Asesmen Nasional (AN) menunjukkan sekitar 2/3 atau lebih dari 50% peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kemampuan bernalar menggunakan konsep matematika, yang berdampak pada daya saing dan menuntut perbaikan pembelajaran berbasis data. Berikut adalah poin-poin penting terkait rendahnya numerasi :

- **Tingkat Pencapaian** : Data Rapor Pendidikan 2021-2022 menunjukkan rata-rata numerasi di berbagai jenjang (SD, SMP, SMA/SMK) berada di bawah standar minimum.
- **Faktor Penyebab** : Rendahnya numerasi berkaitan dengan lemahnya nalar kritis, kurangnya dukungan lingkungan belajar, serta perlunya penguatan kemampuan menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata.
- **Tujuan Asesmen** : Hasil AN, termasuk rendahnya skor numerasi, bukan untuk menghukum, melainkan sebagai alat refleksi untuk membenahi kualitas pembelajaran di sekolah.

- **Upaya Tindak Lanjut** : Kemdikbud Ristek mendorong pemanfaatan data rapor pendidikan untuk intervensi, bimbingan teknis, dan perencanaan peningkatan kualitas pembelajaran, bukan untuk pemeringkatan.

Meskipun rendah, hasil ini menjadi dasar penting bagi satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap metode pengajaran agar siswa mampu mencapai standar kompetensi minimum.

Sasaran 2

Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Nilai Karakter Peserta Didik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	58,35	56,65	97,09

Pelaksanaan Pendidikan karakter ini telah dilaksanakan disekolah. Capaian kinerja nyata indikator Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah sebesar 56,65% dari target sebesar 58,35% direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,09% kategori **Sangat Tinggi** atau rendah target yang diperjanjikan.

Rendahnya cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan merupakan tantangan serius dalam menjaga ketahanan

nasional, terutama di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Permasalahan ini mencakup jangkauan pembinaan yang belum merata, kurangnya penghayatan nilai secara konsisten, serta krisis moral yang ditandai dengan meningkatnya intoleransi dan perilaku individualistik. Berikut adalah analisis komprehensif mengenai penyebab, tantangan, dan faktor penyebab rendahnya cakupan tersebut.

1. Faktor Penyebab Rendahnya Cakupan dan Penghayatan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan lemahnya penguatan nilai-nilai Pancasila antara lain:

- **Kurangnya Sosialisasi dan Pendidikan** : Metode penanaman nilai Pancasila yang kurang menarik, monoton, dan tidak inovatif, terutama bagi generasi muda.
- **Efek Globalisasi dan Budaya Asing** : Masuknya paham liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme yang memengaruhi pola pikir masyarakat menjadi individualistik dan materialistik.
- **Lemahnya Pembinaan Moral** : Kurangnya peran lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat) dalam membina moral dan etika, serta apatisme sebagian masyarakat terhadap nilai kebangsaan.
- **Penyimpangan Nilai oleh Pendukungnya** : Ketidakkonsistenan sebagian pendukung ideologi Pancasila itu sendiri dalam menghayati dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
- **Dampak Digitalisasi** : Penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang cepat di media sosial memecah belah persatuan.

2. Tantangan di Era Digital (2024-2025)

Tantangan saat ini bergeser ke ranah digital di mana Pancasila harus berperan sebagai *moral compass* (kompas moral):

- **Ancaman Radikalisme dan Intoleransi** : Paham ekstremisme yang menolak keutuhan negara bertentangan dengan sila pertama dan ketiga, menciptakan konflik horizontal.
- **Penyalahgunaan Teknologi** : Penggunaan teknologi yang bebas tanpa etika memicu krisis moralitas dan lunturnya semangat gotong royong.
- **Kurangnya Literasi Digital** : Ketidakmampuan memfilter informasi menyebabkan radikalisme dan nilai-nilai asing mudah masuk.

3. Dampak terhadap Karakter Kebangsaan

Lemahnya penguatan ini berakibat pada:

- Menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.
- Meningkatnya perilaku tidak toleran dan korupsi.
- Munculnya gerakan separatis yang menolak keutuhan NKRI.

4. Upaya Penguatan (Solusi)

Untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas penguatan Pancasila, diperlukan pendekatan:

- **Inovasi Pembinaan** : Menggunakan media sosial dan teknologi untuk edukasi yang menarik bagi generasi muda.
- **Kontekstualisasi Nilai** : Membumikan Pancasila agar relevan dengan kehidupan sehari-hari (bukan sekadar hafalan).

- **Penguatan Kurikulum** : Optimalisasi Pendidikan Pancasila dan Karakter di sekolah (Profil Pelajar Pancasila).

Semakin tinggi cakupan pembinaan, semakin baik ketahanan ideologi dan moral bangsa.

Sasaran 3**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Persen	A	BB / 70,50	70,50	71,00	70,50*	99,00

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Adalah 70,50* dari target sebesar 71,00 direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,00% kategori **Sangat Tinggi** atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Rendahnya nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) umumnya disebabkan oleh lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja, serta minimnya SDM kompeten. Dampaknya adalah inefisiensi anggaran dan rendahnya dampak nyata bagi masyarakat. Perbaikan memerlukan komitmen pimpinan, sistem monitoring digital, dan pelibatan publik. Berikut adalah poin-poin krusial terkait rendahnya nilai evaluasi AKIP :

- **Penyebab Utama Rendahnya Nilai:**

- **Perencanaan tidak terintegrasi:** Dokumen perencanaan tidak selaras dengan anggaran dan indikator kinerja.
- **Lemahnya monitoring kinerja:** Minimnya pemantauan berkala terhadap realisasi program.
- **Kapasitas SDM rendah:** Kurangnya pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja (LAKIP/LAKIN).
- **Indikator Kinerja Tidak Jelas:** Tidak berorientasi pada hasil (*outcome*) tetapi hanya aktivitas (*output*).

- **Dampak Rendahnya Akuntabilitas:**

- **Inefisiensi Anggaran:** Potensi pemborosan anggaran tinggi.
- **Tidak Berdampak:** Program tidak memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
- **Predikat Rendah:** Mendapat predikat C atau CC (kurang/cukup akuntabel).

- **Solusi dan Strategi Peningkatan:**

- **Penerapan e-SAKIP:** Menggunakan sistem digital untuk monitoring kinerja.
- **Refocusing Kegiatan:** Mengurangi kegiatan yang tidak prioritas.
- **Pelatihan Teknis:** Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp.200.001.532.531,- (Dua ratus milyar satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh saatu rupiah)** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.184.886.944.741,- (Seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)** atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,44%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 **Sangat Berhasil.**

Tabel 3.6
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							150.896.132.836	138.332.141.307	91,67	
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						221.863.450	148.953.089	67,14	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	6	dokumen	100%	51.993.500	40.396.549	77,70	Menunjang
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	laporan	5	laporan	100%	169.869.950	108.556.540	63,91	Menunjang
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						148.972.749.426	136.675.638.383	91,75	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1460	org/bln	1460	org/bln	100%	148.179.917.426	135.945.547.583	91,74	Menunjang
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	dokumen	72	dokumen	100%	792.832.000	730.090.800	92,09	Menunjang
	III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						33.275.000	33.124.500	99,55	
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daeah pada SKPD	1	laporan	1	laporan	100%	33.275.000	33.124.500	99,55	Menunjang
	IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						68.000.000	64.599.592	95,00	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68	paket	68	paket	100%	68.000.000	64.599.592	95,00	Menunjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah						575.878.500	551.954.458	95,85	
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15	paket	15	paket	100%	16.340.000	15.624.915	95,62	Menunjang
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	paket	16	paket	100%	99.389.000	93.098.649	93,67	Menunjang
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	paket	2	paket	100%	11.667.000	10.699.290	91,71	Menunjang
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94	paket	94	paket	100%	177.255.000	172.974.765	97,59	Menunjang
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35	paket	35	paket	100%	75.232.900	63.868.535	84,89	Menunjang
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4919	dokumen	4919	dokumen	100%	54.173.600	53.886.488	99,47	Menunjang
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141	laporan	141	laporan	100%	141.821.000	141.801.816	99,99	Menunjang
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						155.326.400	138.005.480	88,85	
	1	Pengadaan Mebel	7	unit	7	unit	100%	102.002.000	88.202.000	86,47	Menunjang
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	unit	6	unit	100%	53.324.400	49.803.480	93,40	Menunjang
	VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						582.160.060	493.542.051	84,78	
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19	laporan	19	laporan	100%	195.192.400	156.093.052	79,97	Menunjang
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15	laporan	15	laporan	100%	386.967.660	337.448.999	87,20	Menunjang
	VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.880.000	226.323.754	78,89	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	1	unit	100%	42.950.000	38.948.127	90,68	Menunjang
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	unit	20	unit	100%	192.160.000	143.982.923	74,93	Menunjang
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65	unit	65	unit	100%	51.770.000	43.392.704	83,82	Menunjang
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							48.895.464.645	46.381.968.683	94,86	
	I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						23.100.041.863	21.794.994.522	94,35	
	1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	ruang	1	ruang	100%	125.449.300	122.335.825	97,52	Menunjang
	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	unit	2	unit	100%	133.694.140	129.249.930	96,68	Menunjang
	3	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4	ruang	4	ruang	100%	428.089.032	419.372.000	97,96	Menunjang
	4	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	ruang	1	ruang	100%	111.064.890	102.544.317	92,33	Menunjang
	5	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Perpustakaan Sekolah	4	ruang	4	ruang	100%	318.353.052	269.267.583	84,58	Menunjang
	6	Pengadaan Mebel Sekolah	10	paket	9	paket	90%	858.339.800	709.372.480	82,64	Menunjang
	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	paket	0	paket	0%	49.973.520	-	0,00	Menunjang
	8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100	peserta didik	100	peserta didik	100%	266.534.000	210.558.262	79,00	Menunjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150	orang	150	orang	100%	1.725.330.100	1.392.675.100	80,72	Menunjang
	10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300	orang	300	orang	100%	165.850.000	113.034.165	68,15	Menunjang
	11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	84	satuan pendidikan	84	satuan pendidikan	100%	62.524.000	45.962.997	73,51	Menunjang
	12	Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	84	satuan pendidikan	84	satuan pendidikan	100%	15.312.500.000	15.241.618.361	99,54	Menunjang
	13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84	orang	84	orang	100%	37.645.000	32.762.001	87,03	Menunjang
	14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	dokumen	1	dokumen	100%	19.719.000	19.454.000	98,66	Menunjang
	15	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	39.632.000	28.102.493	70,91	Menunjang
	16	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	404	paket	404	paket	100%	202.000.000	174.758.400	86,51	Menunjang
	17	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	ruang	1	ruang	100%	200.000.000	200.000.000	100,00	Menunjang
	18	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	unit	4	unit	100%	1.044.531.053	1.031.268.129	98,73	Menunjang
	19	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas	20	ruang	20	ruang	100%	881.244.976	755.578.417	85,74	Menunjang
	20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	796	peserta didik	710	peserta didik	89,20	398.000.000	355.000.000	89,20	Menunjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	38	paket	38	paket	100%	719.568.000	442.080.062	61,44	Menunjang
	II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						12.744.995.214	12.000.010.713	94,15	
	1	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	unit	4	unit	100%	522.604.214	516.743.748	98,88	Menunjang
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	305	peserta didik	283	peserta didik	92,79%.	183.000.000	169.800.000	92,79	Menunjang
	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100	peserta didik	100	peserta didik	100%	245.231.600	208.540.298	85,04	Menunjang
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	orang	100	orang	100%	702.751.350	395.700.000	56,31	Menunjang
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100	orang	100	orang	100%	106.955.500	97.265.325	90,94	Menunjang
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19	satuan pendidikan	19	satuan pendidikan	100%	138.960.600	127.706.480	91,90	Menunjang
	7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19	satuan pendidikan	19	satuan pendidikan	100%	9.949.100.000	9.908.382.150	99,59	Menunjang
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19	orang	19	orang	100%	14.065.800	10.105.238	71,84	Menunjang
	9	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	36.841.150	35.616.286	96,68	Menunjang
	10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	283	paket	283	paket	100%	169.800.000	148.018.660	87,17	Menunjang
	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	44	paket	43	paket	90%	675.685.000	382.132.528	56,55	Menunjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						8.442.276.810	8.176.535.362	96,85	
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	unit	1	unit	100%	180.559.400	171.209.598	94,82	Menunjang
	2	Pengadaan Mebel PAUD	1	paket	1	paket	100%	110.413.000	101.591.085	92,01	Menunjang
	3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	350	orang	362	orang	103,43%	2.945.711.100	2.836.626.308	96,30	Menunjang
	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100	orang	184	orang	184%	162.966.200	152.283.430	93,44	Menunjang
	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	138	satuan pendidikan	138	satuan pendidikan	100%	339.628.050	229.826.052	67,67	Menunjang
	6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	138	satuan pendidikan	138	satuan pendidikan	100%	2.920.800.000	2.914.511.165	99,78	Menunjang
	7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	280	orang	280	orang	100%	41.441.800	40.782.562	98,41	Menunjang
	8	Penambahan Ruang Kelas Baru	1	ruang	1	ruang	100%	200.000.000	200.000.000	100,00	Menunjang
	9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	200	peserta didik	200	peserta didik	100%	58.999.700	56.999.714	96,61	Menunjang
	10	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	30.240.950	28.470.767	94,15	Menunjang
	11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	285	paket	285	paket	100%	40.770.000	39.192.990	96,13	Menunjang
	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	7	unit	7	unit	100%	550.812.610	546.774.055	99,27	Menunjang
	13	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	18	paket	18	paket	100%	859.934.000	858.267.636	99,81	Menunjang
	IV	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						4.608.150.758	4.410.428.086	95,71	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	45	peserta didik	39	peserta didik	86,67%	27.000.000	23.400.000	86,67	Menunjang
	2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	547	orang	547	orang	100%	2.692.835.000	2.529.891.549	93,95	Menunjang
	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60	orang	60	orang	100%	25.452.500	21.519.037	84,55	Menunjang
	4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	satuan pendidikan	6	satuan pendidikan	100%	1.534.100.000	1.528.136.432	99,61	Menunjang
	5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	6	orang	6	orang	100%	10.770.500	9.282.087	86,18	Menunjang
	6	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	30.744.000	28.251.500	91,89	Menunjang
	7	Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	unit	1	unit	100%	249.999.758	238.903.983	95,56	Menunjang
	8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	98	peserta didik	98	peserta didik	100%	37.249.000	31.043.498	83,34	Menunjang
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							91.918.000	65.088.308	70,81	
	I	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						91.918.000	65.088.308	70,81	
	1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	orang	100	orang	100%	91.918.000	65.088.308	70,81	Menunjang
D.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							118.017.050	107.746.443	91,30	

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik					Keuangan			Mununjang / Kurang
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	I	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						118.017.050	107.746.443	91,30	
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	dokumen	1	dokumen	100%	118.017.050	107.746.443	91,30	Menunjang
Jumlah Anggaran				-		-		200.001.532.531	184.886.944.741	92,44	

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Pendidikan	1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,16	11,08	99,28	Pengelolaan Pendidikan	48.895.464.645	46.381.968.683	94,86
		1.2	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	Persen	87,50	86,96	99,38				
			1.3								
RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR							98,88	TOTAL PER SASARAN	48.895.464.645	46.381.968.683	94,86
Tingkat Efisiensi :								4,02%			
Tingkat Efektifitas :								105,42%			

Sasaran 1 Kinerja Dinas Pendidikan adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan Program Pengelolaan Pendidikan. Pagu dana dalam Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp.48.895.464.645,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.46.381.968.683,- (94,86%). Adapun indikator dari sasaran ini adalah : Rata-Rata Lama Sekolah, Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi dan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi.

Hasil pengukuran sasaran kinerja 1 untuk persentase (%) rata-rata capaian dari indikator diperoleh melalui perbandingan antara realisasi dan target kinerja, adalah 98,88%. Tingkat efisiensi dihitung dengan cara : (%) capaian kinerja – (%) capaian keuangan. Adapun tingkat efisiensi untuk sasaran kinerja 1 adalah :

$$98,88\% - 94,86\% = 4,02\%.$$

Tingkat efisiensi adalah menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu sudah optimal, artinya digunakan secara minimal dan hasil maksimal. Pelaksanaan kinerja sasaran 1, telah efisien sebesar 4,02%.

Untuk tingkat efektifitas dihitung dengan formulasi : Nilai pagu / realisasi x 100 %. Untuk sasaran kinerja 1, tingkat efektifitasnya adalah

$$\frac{48.895.464.645}{46.381.968.683} \times 100 \% = 105,42\%$$

Efektivitas adalah ukuran seberapa berhasil suatu kegiatan mencapai tujuannya. Untuk efektivitas sasaran kinerja 1 sebesar 105,42% menunjukkan capaian yang maksimal karena lebih dari 100%.

Artinya tingkat efektifitas sasaran kinerja 1 Dinas Pendidikan adalah sangat baik.

A. Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Kualitas Layanan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
2. Tingginya minat penduduk luar daerah Kota Payakumbuh bersekolah di Kota Payakumbuh.

B. Rekomendasi Solusi

1. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah di Kota Payakumbuh
2. Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional dan menerapkan sistem PPDB Zonasi.

Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya Nilai karakter peserta didik	2.1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	58,35	56,65	97,09	Pengembangan Kurikulum	91.918.000	65.088.308	70,81
								Pendidik dan Tenaga Kependidikan	118.017.050	107.746.443	91,30
								Pengelolaan Pendidikan	48.895.464.645	46.381.968.683	94,86
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							97,09	TOTAL PER SASARAN	49.105.399.695	46.554.803.434	85,66
Tingkat Efisiensi :								11,43%			
Tingkat Efektifitas :								105,48%			

Sasaran 2 Kinerja Dinas Pendidikan adalah Meningkatnya Nilai karakter peserta didik dengan Program pendukung yaitu :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Pengelolaan Pendidikan | = Rp. 48.895.464.645,- |
| - Pengembangan Kurikulum | = Rp. 91.918.000,- |
| - Pendidik dan Tenaga Kependidikan | = Rp. 118.017.050,- |

Dengan total Rp.49.105.399.695,- dengan realisasi sebesar Rp.46.554.803.434,- (85,66%). Indikatornya adalah Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Adapun capaian kinerjanya adalah 97,09%. Dari target yang ditetapkan sebesar 58,35 realisasi adalah 56,65%.

Untuk tingkat efisiensi diperoleh angka 11,43% dan tingkat efektifitas adalah 105,48%. Untuk tingkat efisiensi masih rendah ,namun tingkat efektifitas sangat tinggi karena melebihi 100%.

A. Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Kualitas Layanan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
2. Tingginya minat penduduk luar daerah Kota Payakumbuh bersekolah di Kota Payakumbuh.

B. Rekomendasi Solusi

1. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah di Kota Payakumbuh
2. Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional dan menerapkan sistem PPDB Zonasi.

Tabel 3.9
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	Nilai	71,00	70,50*	99,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	150.896.132.836	138.332.141.307	91,67
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							99,00	TOTAL PER SASARAN	150.896.132.836	138.332.141.307	91,67
Tingkat Efisiensi :								7,33%			
Tingkat Efektifitas :								109,08%			

Sasaran 3 Kinerja Dinas Pendidikan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.150.896.132.836,- dengan realisasi sebesar Rp.138.332.141.307,- (91,67%). Indikatornya adalah Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat. Adapun capaian kinerjanya adalah 99,00% Dari target yang ditetapkan sebesar 71,00 realisasi adalah 70,50*.

Untuk tingkat efisiensi diperoleh angka 7,33% dan tingkat efektifitas adalah 109,08%. Untuk tingkat efisiensi masih rendah ,namun tingkat efektifitas sangat tinggi karena melebihi 100%.

A. Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

B. Rekomendasi Solusi

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan bidang tugasnya.

Jadi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya sinergitas program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM.

2. Perlu adanya tambahan dukungan dana pendidikan terutama disekolah karena masih terbatasnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Perlu adanya tambahan pengadaan guru PNS (terutama jenjang SD) karena jumlah PNS yang ada belum mencukupi.

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
NIHIL			

2. Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Propinsi

Peringkat	No	Nama	Asal Sekolah
	I.	KARATE	
I	1	Fathar Muhammad Qaisar	PPS Bunaya
	II.	SILAT	
II	1	Alvaro Dandes	SMPN 4 Payakumbuh

II	2	Kirani Nurfadila	SMPN 4 Payakumbuh
III	3	Darell Athaya Gredo	SMPN 1 Payakumbuh
	III.	OSN SD/MI	
IPA	1	Aylha Adhia Zahra	MIN Kota Payakumbuh
IPS	2	Allena Sacjio Arnov	SD Islam Raudhatul Jannah
	IV.	FLS3N SMP	
I	1	Joviant Dwi Octo	SMP Islam Raudhatul Jannah
	V.	GSI	
I	1	Diego Tsaqif Arianto	SMPN 1 Payakumbuh
I	2	Iqra Fadhillah Mumtaz	SMPN 1 Payakumbuh
I	3	Muhammad Dziko Adytia	SMPN 1 Payakumbuh

Nasional

Peringkat	I.	KARATE	Asal Sekolah
Harapan I	1	Fathar Muhammad Qaisar	PPS Bunaya
		GSI	
II/Perak	1	Iqra Fadhillah Mumtaz	SMPN 1 Payakumbuh
III/Perunggu	2	Diego Tsaqif Arianto	SMPN 1 Payakumbuh
		OPSI	
III/Perunggu	1	Kiara Alya Putri Cesar Ibrahim Milan	SMP Islam Raudhatul Jannah

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (sasaran) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.200.001.532.531,- (Dua ratus milyar satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh saatu rupiah)** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.184.886.944.741,-**

(Seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,44%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 **Sangat Berhasil**.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2025-2029 menetapkan sebanyak 3 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2025.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar mencapai **Rp.184.886.944.741,-** **(Seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh adalah 92,44% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Sasaran dan Tujuan Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

NALFIRA, S. Pd., M.S.E
NIP. 19721009 200003 1 003



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

INSPEKTORAT

*Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
email.inspektoratpyk@gmail.com*

Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, 31 Maret 2026
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH

Dr. SYAFRIL, S.H., M.H., CGCAE
NIP. 19700405 199703 1 004

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan			Check List
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10	IKU dan IK telah SMART	√

Payakumbuh, 31 Maret 2026

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH



Dr. SYAHRI, S.H., M.H., CGCAE

NIP. 19700405 199703 1 004